

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Asia Tenggara adalah kawasan yang didominasi oleh perairan. Wilayah yang dibatasi tiga negara yaitu Indonesia, Malaysia dan juga Filipina merupakan salah satu perairan yang sangat strategis serta merupakan salah satu jalur pelayaran terpadat sekaligus paling berbahaya kedua setelah Selat Malaka yaitu kawasan laut Sulu-Sulawesi. Diperkirakan 10.000 kapal tiap tahunnya melewati jalur laut tersebut yang membawa berbagai barang dan komoditas dengan nilai total US\$40 milyar. Laut Sulawesi yang berada di perairan sebelah utara Indonesia termasuk dalam status Alur Laut Kepulauan Indonesia yang terbentuk sesudah diadakannya Konvensi PBB mengenai Hukum Laut tahun 1982 dari konsekuensi pengakuan status Indonesia secara hukum sebagai Negara Kepulauan.

Indonesia serta beberapa negara kepulauan lainnya menerima status *Archipelagic State* yang demikian menjamin keutuhan dan kedaulatan wilayah nasional yang terdiri dari darat, laut dan udara. Alur Laut Kepulauan berdasarkan UU No. 6 tahun 1996 dan PP No. 37 tahun 2002 merupakan alur laut yang dilewati oleh kapal maupun pesawat udara asing di atas perairan Indonesia yang bertujuan dalam melakukan pelayaran serta penerbangan secara normal semata-mata untuk transit secara terus menerus, langsung serta secepat mungkin dan tak dihalangi kegiatan ataupun aktifitas tertentu yang bisa mengganggu jalur pelayaran.

Dalam keterkaitannya dengan Indonesia, Laut Sulu berada pada pintu garis ALKI II, sebuah garis yang merupakan lalu lintas kapal-kapal Internasional. Sebagai pintu ALKI II, Laut Sulu menjadi kawasan perairan padat dan bernilai ekonomi tinggi. kawasan perairan tersebut menjadi jalur perdagangan dari Afrika ke Asia Tenggara serta Jepang, kemudian dari

Australia ke Singapura, Tiongkok, Jepang dan begitupun sebaliknya (Buntoro, 2017, p. 59). Sehingga wilayah perairan ini sangat berpotensi untuk dilewati berbagai kapal lintas negara dalam aktifitas dagang dalam jumlah besar.

Laut Sulawesi menjadi pintu masuk utara untuk kapal-kapal yang akan melintasi ALKI II menuju Samudera Hindia. Laut Sulawesi sendiri bersebelahan dengan Samudera Pasifik, Laut Sulu, dan pulau-pulau di bagian Filipina selatan. Dalam penelitian mengenai biota laut, Laut Sulawesi adalah salah satu wilayah yang kaya dengan terumbu karang. Latar tropis serta arus tenang yang hangat menjadi tempat hidup sekitar 580-793 spesies koral pembangun karang dunia.



Gambar 4.1 Batas ZEE Indonesia, Malaysia dan Filipina Di Laut Sulawesi

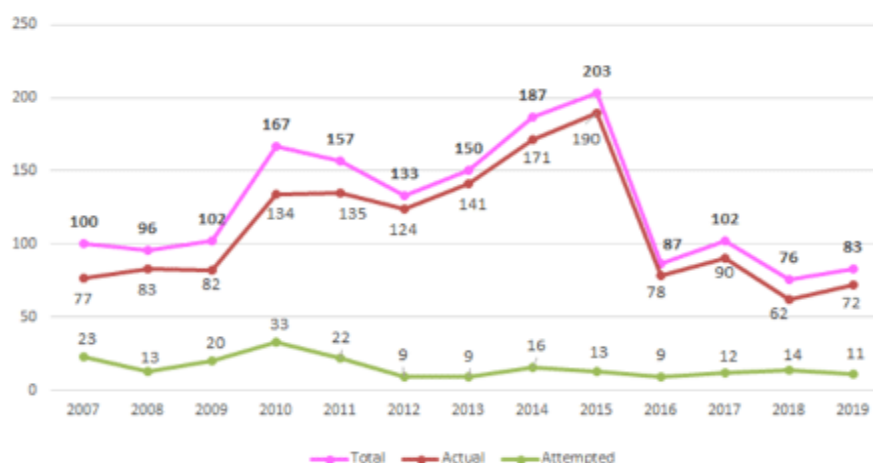
Sumber: Arifin et al., 2018

Selain itu berbagai jenis kehidupan bawah laut mempunyai nilai ekonomis tinggi yang dapat hidup dengan baik di perairan ini, misalnya Tuna dan Tuna Sirip Kuning (Thoyib, 2009). Sehingga laut Sulu maupun laut Sulawesi ditetapkan sebagai Sulu-Sulawesi *Marine Ecoregion* (SSME) yang menjadi kawasan konservasi dunia. Ketiga negara; Indonesia, Malaysia serta Filipina juga sudah memprakarsai *Memorandum of*

Understanding (MoU) mengenai rencana konservasi pada ekoregion perairan Sulu-Sulawesi (Kementerian Perikanan dan Kelautan, 2014).

Selain itu, Laut sulu-sulawesi juga menjadi perhatian banyak negara dikarenakan kasus kejahatan wialayah tersebut telah meningkat utamanya kasus pembajakan kapal pada tahun 2016. Jenis kejahatan sering terulang yang notabane dilakukan oleh kelompok yang bertempat tinggal di pulau-pulau kecil seperti Pulau Sibutu, Tawi-tawi, Jolo dan Basilan. Dalam masanya, ada beberapa kelompok bajak laut yang berasal dari Filipina Selatan kepulauan yakni kelompok Lanun, Balangingi serta Mindanao. Menurut data dari IMB yang terpusat di Kuala Lumpur, Malaysia, pada tahun 2015 setidaknya sudah terjadi 11 kali serangan di wilayah tersebut yang dilengkapi dengan senjata api.

Tabel 4.2 Number of Incidents (2007-2019)



Sumber: Maritime Mutual, 2020

Data dari ReCAAP juga menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2016 telah terjadi 16 kali kasus penyanderaan kru kapal yang meminta uang tebusan dalam jumlah yang besar terhadap pihak keluarga maupun perusahaan kapal. Beberapa rangkaian peristiwa terjadi yang melibatkan

awak kapal dari Indonesia seperti pada tanggal 26 Maret 2016 di Kapal Brahma 12 yang menyandra 10 ABK warga negara Indonesia. Kemudian di bulan April awal juga terjadi pembajakan pada kapal Malaysia yang menyandra 4 ABK Malaysia, selanjutnya pada pertengahan April 2016 terulang kembali pembajakan terhadap kapal TB Henry dan Cristi dengan korban 4 ABK warga Indonesia, dan pada bulan Juni kapal TB Charles 001 dan Robby 152 dibajak dengan korban sandra 7 ABK.

Selanjutnya pada bulan Juli 2016 terjadi dua kali insiden terhadap kapal Indonesia Fishing Trawler dan kapal Malaysia Serudong 3. Disusul kejadian pada bulan September di tahun yang sama sebanyak satu kasus kapal Fishing Trawler, bulan Oktober kapal Dong Bang Giant 2, bulan November sebanyak 6 kasus serta bulan Desember 2 kasus (ReCAAP, 2016). Tentunya hal tersebut merupakan rangkaian peristiwa yang mengakibatkan kekhawatiran bagi negara negara yang memiliki kepentingan di wilayah laut sulu-sulawesi utamanya bagi negara seperti Indonesia, Malaysia dan juga Filipina yang memiliki kepentingan di dalamnya. Oleh karenanya dibutuhkan adanya sebuah penanganan dalam merespon aksi kejahatan tersebut.

4.2 Hasil Pengumpulan Data

Pada Sub-bab ini peneliti memaparkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dari beberapa narasumber serta kajian pustaka dari buku-buku, jurnal, arsip, laporan serta dokumen-dokumen pendukung lainnya dalam menjawab pertanyaan penelitian.

4.2.1 Kerja Sama Trilateral Indomalphi

Kerja sama diantara negara merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Indonesia yang berideologi politik bebas aktif membentuk kerja sama internasional dengan tetap berpedoman terhadap prinsip negara nonblok yang tidak beraliansi dengan negara manapun. Meskipun demikian, Indonesia terus berupaya secara

aktif pada percaturan internasional agar terciptanya kawasan yang damai, baik pada lingkup global maupun regional (Kemenhan RI, 2015). Secara global, Indonesia acapkali berpartisipasi dalam berbagai forum internasional khususnya di bidang pertahanan.

Forum Jakarta International Defence Dialogue (JIDD), adalah salah satu upaya serta inisiasi Indonesia bersama negara lain guna saling berbagi informasi di bidang pertahanan. Selain itu Indonesia juga berpartisipasi pada Shangrila Dialogue, Tokyo Defence Forum, Xiangshan Forum, Moscow Conference, serta forum internasional lainnya yang harus tetap terjaga agar menjadi salah satu rujukan dalam membentuk kerja sama pertahanan. Indonesia juga berperan pada penyelesaian konflik politik di Filipina seperti dalam perjanjian damai Moro Islamic Liberation Front (MILF) dengan mengirimkan pengamat militer yang tergabung dalam International Monitoring Team (IMT). Indonesia juga turut terlibat dalam forum yang diselenggarakan oleh negara lainnya seperti, Western Pacific Naval Symposium, Indian Ocean Naval Symposium, Pacific Islands Forum (PIF) serta Melanesian Spearhead Group (MSG).

Dalam Kawasan Asia-Pasifik, keterlibatan Indonesia juga dapat dilihat pada ASEAN Regional Forum (ARF). Forum tersebut merupakan wadah dalam melaksanakan dialog diberbagai isu baik politik maupun keamanan yang menjadi perhatian tiap negara. Keterlibatan Indonesia di forum ASEAN juga dapat digambarkan dalam Penelitian yang dilakukan oleh Khairani (2017) dengan judul *“Strategi Kerja sama di Bidang Counter Terrorism Melalui ASEAN Defense Ministers’ Meeting Plus Dalam Meningkatkan Kemampuan Penanggulangan Terorisme di Indonesia”*. penelitian tersebut berkesimpulan bahwa strategi kerja sama di bidang *Counter Terrorism* bisa meningkatkan kemampuan penanggulangan terorisme di Indonesia, serta hal tersebut sudah dirasakan oleh Indonesia dari aspek peningkatan kemampuan personel maupun kemampuan penggunaan teknologi alutsista.

Menurut Mayor Jenderal TNI (Mar) Dr. Syaiful Anwar, M.Bus., M.A. sebagai Akademisi Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan dalam wawancara 11 Januari 2021 mengungkapkan bahwa:

“Secara politik kerja sama internasional bertujuan untuk menjalin hubungan baik. Dalam konteks keamanan untuk menyelesaikan masalah bersama dan untuk menunjukkan keseriusan negara kepada pihak pihak internasional”.

Sebelumnya Indonesia telah melakukan kerja sama pertahanan dengan Malaysia sejak tahun 1972 dengan penanda ditanda tangannya perjanjian keamanan di wilayah perbatasan kedua negara. Selanjutnya, Indonesia dan Malaysia juga telah menginisiasi kerja sama dalam meningkatkan keamanan regional. Kerja sama tersebut diinisiasi Indonesia dan Malaysia dengan Singapura dalam rangka melakukan pengamanan Selat Malaka pada kerja sama trilateral Malsindo. Selain itu sejak tahun 1975, Indonesia telah menandatangani kerja sama bilateral dengan Filipina dalam menangani isu terorisme yang ada di Filipina Selatan.

Dalam merespon aksi kejahatan di kawasan laut Sulu-Sulawesi, Indonesia berinisiatif melaksanakan kerja sama trilateral Indomalphi. Hal itu dikarenakan aksi kejahatan di laut Sulu-sulawesi, memiliki dampak paling besar bagi negara Indonesia (Wawancara Kolonel Inf Kurniawan Firmuzi S, SE, 17 Januari, 2021). Hal serupa juga disampaikan oleh Kolonel Kav Oktaheroe Ramal, S.IP, M.SC sebagai Kepala Subdirektorat, Direktorat Jendral Strategi pertahanan, Kementerian pertahanan Indonesia dalam Wawancara 21 Januari 2021 yang menyatakan bahwa:

“Beberapa tahun sebelumnya kapal kapal yang melewati kawasan tersebut sering mengalami perompakan. Awak kapal yang sering menjadi korban perompakan maupun penculikan adalah warga negara Indonesia. Jika hal ini terus

menerus terjadi tentunya akan berdampak pada kepentingan nasional kita”.

Menurut Mayor Jenderal TNI (Mar) Dr. Syaiful Anwar, M.Bus., M.A. mengungkapkan bahwa Laut Sulu-Sulawesi sendiri merupakan jalur lalu lintas perdagangan internasional yang merupakan jalur ketergantungan banyak negara. Sehingga keterlibatan Indonesia dalam pengamanannya juga akan meningkatkan reputasinya dimata dunia. Kerja sama trilateral Indomalphi dimulai sejak pertemuan antara tiga negara di Yogyakarta pada bulan Mei 2016. Pada pertemuan tersebut tiap negara mengirim perwakilan Menteri Luar Negeri serta prajurit angkatan yang dari Indonesia diwakili oleh ibu Retno Marsudi dan panglima TNI Gatot Nurmantyo. (Kemlu RI, 2016).

Terdapat empat kesepakatan yang berkaitan dengan keamanan perairan di wilayah Laut Sulu Sulawesi:

- a. Ketiga negara berkomitmen bekerja sama untuk berpatroli menjaga perairan dari tindak kejahatan, misalnya, perompakan, atau penyelundupan
- b. Pembahasan tentang respons atau reaksi Indonesia, Malaysia, dan Filipina, jika terjadi tindakan kejahatan di perairan masing masing.
- c. Kemudian pembahasan standar operasional prosedur yang jelas dan detail pada setiap tahapan yang akan dibahas masing masing menteri luar negeri dan panglima militer.
- d. Keempat kesepakatan itu akan dibahas dan diperinci secara teknis dalam pertemuan trilateral.

Selanjutnya pada tanggal 14 Juli 2016, ketiga negara menandatangani MOU yang menghasilkan kesepakatan yang disebut The Sulu Sea Patrol Initiative (SSPI) yang sesuai dengan Standard Operating Procedures (SOP). Dalam kerja sama tersebut tetap memegang prinsip

ASEAN way dimana setiap negara tidak berhak ikut campur urusan nasional negara lain. Hal tersebut sejalan yang disampaikan Kolonel Inf Kurniawan Firmuzi S, SE, dalam wawancara 17 Januari 2021 yang mengatakan bahwa Selama negara tidak meminta bantuan dalam permasalahan negaranya maka tiap negara tidak berhak ikut campur dalam permasalahan tersebut (Divianta, 2016)..

Hal serupa juga dipertegas Mayor Jenderal TNI (Mar) Dr. Syaiful Anwar, M.Bus., M.A. wawancara 11 Januari 2021 yang mengungkapkan bahwa:

“Prinsip Nonintervensi ini memang merupakan kesepakatan umum, namun secara parsial, jika ada kesepakatan yang dilakukan secara bersama tidak menjadi masalah. Seperti misalnya operasi di Selat Malaka. Yang dimana melewati batas negara lain yang secara hukum Internasional melanggar kedaulatan wilayah suatu negara. Namun itu juga merupakan kesepakatan yang telah disetujui”.



Gambar 4.2 Usulan Area Operasi TMP Indomalphi

Sumber: Arifin et al., 2018

Berdasarkan Wawancara Kolonel Inf Kurniawan Firmuzi S, SE, 17 Januari, 2021 menyebutkan bahwa Kerja sama Trilateral Indomalphi merupakan kerja sama yang mengacu pada kerja sama internasional

sebelumnya yang telah berhasil dilaksanakan di Selat Malaka yang disebut Malacca Strait Patrol (MSP). MSP ini sudah berkembang bukan hanya berpatroli di laut, namun juga berpatroli di udara atau yang dikenal dengan *Patroli Eyes In the Sky* dan bukan hanya terdiri atas tiga negara tetapi sudah bertambah menjadi empat negara yaitu Thailand. Mengingat situasi pembajakan yang terjadi di sekitar perairan laut Sulu, oleh karenanya Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu kala menjabat sebagai Menteri Pertahanan berinisiatif mengaplikasikan kerangka kerja sama Patroli Selat Malaka di Laut Sulu.

Didalam perjanjian trilateral Cooperation ada tiga bentuk rangkaian kerja sama, seperti *Exercise and Training*, *Port Visit* dan *Coordinate Patrol*. Kerja sama Trilateral Port Visit sendiri adalah salah satu komponen Trilateral Co-operative Arrangement (TCA) yang dilaksanakan pertama kali pada 13 sampai 15 November 2017 di Batu-Batu Pier Tawi-Tawi, Filipina, sebagai rangkaian kegiatan Kerja sama Indomalphi yang akan menguatkan kerja sama ketiga negara (Sangga, 2018). Prajurit TNI AL sebagai pelaksana dilapangan dibawa koarmada 2 yang melingkupi wilayah kerja Indonesia bagian tengah bersama sama dengan unsur unsur Patroli Malaysia dan Filipina melaksanakan patroli selama 120 hari dalam kurung waktu 1 tahun. Selanjutnya dalam kurung waktu tersebut dilaksanakan kunjungan atau Port Visit sekiranya selama 3 hari.

Dalam kunjungannya prajurit TNI melakukan kegiatan seperti *Courtesy Call*, Melaksanakan Seminar, Diskusi bersama bagaimana meningkatkan kerja sama ini sehingga lebih efektif efisien dalam melaksanakan Indomalphi. Setelah itu prajurit prajurit yang ada didermaga dilakukan beberapa kegiatan seperti olahraga bersama, *fun games*, dan juga undangan jamuan makan malam yang dilanjutkan dengan penampilan budaya masing masing negara yang diperuntukkan untuk memperat hubungan antara tiga negara yang semuanya dilakukan secara bergiliran baik itu di Indonesia Filipina dan juga Indonesia.

4.2.2 Strategi Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Kerja sama Indomalphi

Dalam buku Pertahanan Republik Indonesia (2015), Pertahanan negara diselenggarakan dengan strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Pertahanan negara Indonesia bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman baik yang berasal dari luar maupun dari dalam negeri. Hal ini juga dilaksanakan dalam rangka menjamin terwujudnya visi, misi, dan agenda prioritas Pemerintah dalam rangka mendukung kebijakan pertahanan negara. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan pertahanan negara dirumuskan dalam lima sasaran strategis yang saling terkait.

- a. Mewujudkan pertahanan negara yang mampu menghadapi ancaman
- b. Mewujudkan pertahanan negara yang mampu menangani keamanan wilayah maritim, keamanan wilayah daratan dan keamanan wilayah dirgantara;
- c. Mewujudkan pertahanan Negara yang mampu berperan dalam menciptakan perdamaian dunia berdasarkan politik bebas aktif;
- d. Mewujudkan industri pertahanan yang kuat, mandiri dan berdaya saing; dan
- e. Mewujudkan warga negara Indonesia yang memiliki kesadaran bela negara.

Kerja sama keamanan laut merupakan pengimplementasian dari kebijakan Nasional Indonesia yang dikeluarkan oleh presiden Joko Widodo yang memiliki Visi misi kelautan sebagai Poros Maritim dunia. Pada Poros Maritim Dunia (PMD) adalah mewujudkan Indonesia sebuah negara maritim yang maju, berdaulat, mandiri, kuat, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan perdamaian kawasan

dan dunia sesuai dengan kepentingan nasional. Dalam mewujudkan Visi dan Misi Kebijakan Kelautan tersebut Pemerintah Indonesia juga merumuskan tujuh pilar kebijakan dalam mewujudkan poros maritim dunia tersebut. Ketujuh pilar yang dirumuskan tersebut adalah:

- a. Pengelolaan sumber daya kelautan dan pengembangan sumber daya manusia
- b. Pertahanan, keamanan, penegakan hukum dan keselamatan di laut.
- c. Tata kelola dan kelembagaan di laut.
- d. Ekonomi, infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan.
- e. Pengelolaan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut.
- f. Diplomasi maritim.

Laut Sulu merupakan kawasan yang terletak di wilayah kerawanan dari pembajakan ataupun perompakan, dan berada di teritorial maupun ZEE dari Filipina, sehingga dari perspektif Indonesia peran terbesar berada pada negara Filipina untuk dapat mengatasi kelompok yang mendiami kepulauan sulu. Namun Indonesia semaksimal mungkin mendukung dan melindungi *sea line of Communication* demi terciptanya keamanan kelancaran jalur jalur perdagangan dan transportasi yang melalui wilayah tersebut. (Wawancara Mayor Laut (P) Herstyadi Sapto Condro, M.S.M, 13 Januari 2020). Apalagi seperti yang dijelaskan dalam wawancara dengan Kolonel Inf Kurniawan Firmuzi S, SE, 17 Januari, 2021, yang mengatakan Indonesia mengalami dampak paling besar dalam kegiatan perompakan dan pembajakan di Laut Sulu.

Kolonel Kav Oktaheroe Ramal, S.IP, M.SC dalam wawancara 21 Januari 2021 juga menambahkan di beberapa tahun sebelumnya kapal kapal yang melewati kawasan tersebut sering mengalami perompakan. Awak kapal yang sering menjadi korban perompakan maupun penculikan adalah warga negara Indonesia. Tentunya TNI seagai lembaga pertahanan

dan juga keamanan wilayah memiliki tanggung jawab terhadap keselamatan warga negara Indonesia.

Saat ini kerja sama trilateral Indomalphi terus dikembangkan dengan membangun sarana dan prasarana demi menunjang peningkatan kerja sama melalui pertukaran informasi antara tiga negara. Salah satu upaya yang dilakukan Indonesia untuk menunjang hal tersebut yaitu dengan membangun *Maritime Command Centre* (MCC). Namun hingga saat ini MCC dimasing masing negara baru Malaysia yang sudah siap dan telah membangun MCC di Tawau yang terhubung langsung dengan Kuala Lumpur. Dan hal tersebut sudah dipraktekkan di Kuala Lumpur, Johor dan Sabah. Namun, Indonesia yang berada di Tarakan belum memiliki MCC dan baru mengusulkan anggaran pembangunan MCC. MCC sangat penting sebagai bentuk pertukaran informasi yang dilakukan secara terus menerus antara MCC di Tarakan-Indonesia, Tawau-Malaysia dan di Tawi-Tawi Filipina.

Secara teknis sebagaimana yang dikatakan Mayor Jenderal TNI (Mar) Dr. Syaiful Anwar, M.Bus., M.A. dalam wawancara 11 Januari 2021 yang perlu dipersiapkan dalam kegiatan Port Visit Indomalphi adalah kesiapan prajurit yang siap beroperasi, kemudian logistik yang disiapkan termasuk peralatan tempur. Sejalan dengan ungkapan tersebut prajurit yang dikirimkan tentunya adalah prajurit yang telah memiliki pengalaman khusus dan juga kapal yang dikirimpun kapal generasi terbaru dengan teknologi radar canggih, sehingga ini merupakan ajang gelar kekutan juga.

Keterlibatan TNI-AL sebagai pelaksana tugas sudah diatur dalam UU no. 34 tahun 2004 dalam pasal 9 di mana Angkatan Laut bertugas:

- a. melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan;
- b. menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi;

- c. melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah;
- d. Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut; serta
- e. Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut.

Program program utama dalam melaksanakan strategi kebijakan diplomasi maritim, sebagai berikut (Kebijakan Kelautan Indonesia, 2017):

- a. Peningkatan kepemimpinan di dalam berbagai kerja sama dibidang kelautan pada tingkat bilateral, regional, dan multilateral
- b. Peningkatan peran aktif dalam upaya menciptakan dan menjaga perdamaian dan keamanan dunia di bidang kelautan
- c. Kepemimpinan atau peran aktif dalam penyusunan berbagai norma internasional bidang kelautan;
- d. Percepatan perundingan penetapan batas maritim Indonesia dengan negara tetangga;
- e. Percepatan submisi penetapan ekstensi landas kontinen sesuai dengan hukum internasional;

Kemudian secara spesifik Tugas pokok sebagaimana dimaksud, dilakukan dengan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, seperti:

- a. Mengatasi gerakan separatis bersenjata;
- b. Mengatasi pemberontakan bersenjata;
- c. Mengatasi aksi terorisme;
- d. Mengamankan wilayah perbatasan;
- e. Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis;

- f. Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri;
- g. Mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya;
- h. Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;
- i. Membantu tugas pemerintahan di daerah;
- j. Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang;
- k. Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia;
- l. Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan;
- m. Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (*search and rescue*); serta
- n. Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.

Dalam mekanisme Port Visit Indomalphi, prajurit TNI angkatan laut ketika memasuki suatu wilayah perairan negara lain akan disambut angkatan laut dari negara yang bersangkutan dan pada saat itu telah melakukan latihan bersama, seperti latihan latihan lintas melintas, komunikasi, dan latihan menangkap prompak secara bersama sama. Menurut Kolonel Kav Oktaheroe Ramal, S.IP, M.SC, dalam wawancara 21 Januari 2021 Hal ini akan berdampak pada peningkatan *Capacity Building* yang akan berkembang pada level kebijakan misalnya kementerian yang terkait.

Kolonel Inf Kurniawan Firmuzi S, SE, dalam 17 Januari, 2021 juga menambahkan bahwa:

“Dalam melakukan kunjungan ke kapal militer negara lain, kita akan mendapatkan informasi secara tidak langsung tentang seberapa canggih kapal mereka. Dengan memantau dan mencermati apa apa saja yang disana. Sehingga ini akan meningkatkan naluri intelijen prajurit untuk mengumpulkan data pasukan lainnya. semuanya itu merupakan bagian dari peningkatan capacity building.

Meskipun demikian yang perlu menjadi perhatian bahwa kawasan yang dibatasi oleh tiga negara ini, masih memiliki sejarah konflik perbatasan dimana Indonesia dan Filipina pernah bersitegang masalah perbatasan di laut Mindanau dan laut Sulawesi, di Pulau Sipadang Likitan dan ambalat antara Indonesia dan Malyasia. Selain itu konflik Sabah masih menyimpan sengketa diantara Malaysia dan Filipina yang belum terselesaikan sampai saat ini. Kedua negara ini masih saling mengklaim wilayah perbatasan di sabah Malaysia yang dianggap Filipina bahwa Sabah masih merupakan bagian dari kesultanan Sulu (Wawancara Kolonel Inf Kurniawan Firmuzi S, SE, 17 Januari, 2021). Dengan adanya kerja sama yang dibangun mengisyaratkan bahwa tiap negara telah sepakat dalam menyelesaikan permasalahan bersama serta telah tumbuh kesadaran akan perlunya kerja sama yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan rasa saling percaya.

Dalam kegiatan Port Visit Indomalphi, Mayor Laut (P) Herstyadi Sapto Condro sebagai komandan KRI Sura 805 yang mengikuti kegiatan tahunan port visit pada bulan November 2019 di Zamboanga Filphina dalam wawancara 13 Januari 2020 mengatakan bahwa:

“Antusiasme dari tiap tiap kontingen negara kelihatan bersemangat di setiap kunjungan baik saat kunjungan ke Indonesia, Malaysia maupun di Filipina. Dalam kunjungannya di Indonesia disediakan berbagai fasilitas, penginapan, pesta kecil kecilan yang semua itu dilakukan untuk meningkatkan interaksi, dan komunikasi”.

Kemudian Menurut Kolonel Kav Oktaheroe Ramal, S.IP, M.SC Wawancara 21 Januari 2021 menyatakan bahwa:

“Dalam kerja sama Port Visit akan mempererat hubungan emosional dengan negara lain dalam rangka pertemuan persahabatan, latihan terbatas, lintas damai dari satu negara ke negara lain secara bergantian, sehingga yang diharapkan kondisi kondusif dan positif tercipta antar satu negara dengan negara lain”

Pernyataan ini juga didukung oleh keterangan Kolonel Inf Kurniawan Firmuzi S, SE, 17 Januari, 2021, berdasarkan ungkapan Dirjen Strahan Mayjen TNI Dr. rer. pol. Rodon Pedrasan, M.A. yang menyatakan bahwa:

“Port Visit sendiri merupakan bagian dari Strategi Diplomasi Pertahanan untuk meningkatkan Confidence building Measure (CBM). Dalam kegiatan Port Visit ada kunjungan ke kapal patroli negara lain begitupun sebaliknya. Artinya kita memberikan kepercayaan kepada mereka dan mereka memberikan kepercayaan kepada kita untuk bisa meninjau kapal mereka”

4.3 Hasil Pengolahan Data

Pada Sub-bab ini peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber, dengan menguji kredibilitas data dengan cara mengecek fakta melalui data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber yang berbeda.

Tabel 4. 1. Triangulasi Sumber

Pertanyaan Penelitian	Informan	Hasil
Bagaimana bentuk Kerja sama Trilateral port visit Indomalphi 2017-2019?	Mayjen Dr. Saipul Anwar	<ul style="list-style-type: none"> • Kerja sama dalam bentuk latihan gabungan yang dapat di skenarioikan seolah terjadi pembajakan dan bisa saling berkordinasi. • kerja sama yang mengacu pada kerja sama Malacca Startit Patrol • Respon negara dalam mengatasi ancaman pembajakan dan perompakan • Memuat prinsip non intervensi.
	<p>Kerja sama Indomalphi merupakan kerja sama dalam bentuk latihan gabungan yang dapat di skenarioikan seolah terjadi pembajakan dan bisa saling berkordinasi. Kerja sama ini merupakan kesepakatan yang dilakukan pada level pemerintah serta pada level strategis dan sebagai pelaksana, prajurit TNI mendukung dalam membangun hubungan yang lebih baik. Kerja sama ini mengemplementasiakn person to person contact, meskipun pada level pemerintah sebagai pengambil kebijakan sudah sering melakukan pertemuan, sehingga pada kerja sama ini para prajuritpun melakukan kontak langsung dengan negara lain sehingga timbul rasa saling percaya antar prajurit. Kemudian kita juga mendapat manfaat manfaat untuk bertukar informasi, dan bertukar pengetahuan tentang hal yang baru.</p>	

	<p>Dalam kesepakatan kerjasama juga memuat prinsip non intervensi yang merupakan kesepakatan umum, namun secara parsial, jika ada kesepakatan yang dilakukan secara bersama tidak menjadi masalah. Seperti misalnya operasi di Selat Malaka. Yang dimana melewati batas negara lain yang secara hukum Internasional melanggar kedaulatan wilayah suatu negara. Namun itu juga merupakan kesepakatan yang telah disetujui.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan patroli di wilayah perairan masing masing selama 120 hari dalam kurung waktu 1 tahun. • Dilakukan skenario latihan lintas melintas, komunikasi, serta latihan menangkap prompak secara bersma sama.
	<p>Kolonel Dr. Okta Heroe</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Trilateral Cooperation terdiri atas kerja sama Exercise and Training, Port Visit dan Coodinate Patrol.
	<p>Dalam Port Visit Indomalphi, TNI angkatan laut ketika memasuki suatu wilayah prairan negara lain akan disambut angkatan laut mereka dan saat itu sudah melakukan latihan bersama sama. Seperti latihan latihan lintas melintas, komunikasi, latihan menangkap prompak secara bersma sama. Ketika berada di pantai, biasanya melibatkan pemerintah setempat yang tentunya diberikan sambutan yang berkoordinasi dengan protokoler kemudian diberikan jamuan makan malam dan malam budaya yang di perankan oleh prajurit sendiri.</p> <p>Keuntungan kerja sama yang didapat dalam kegiatan Port Visit ini adalah mempererat hubungan emosional dengan negara lain dalam rangka pertemuan persahabatan, latihan terbatas, lintas damai dari satu negara ke negara</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Port Visit Indomalphi di Zamboanga memiliki beberapa kegiatan seperti Courtesy Call, Melaksanakan Seminar, Diskusi bersama, olahraga bersama, Fun games, dan juga undangan jamuan makan malam.

	<p>lain secara bergantian, sehingga yang diharapkan kondisi kondusif dan positif untuk melaksanakan kerja sama antar satu negara dengan negara lain.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Berkunjung ke MCC masing masing untuk melihat sejauh mana pembangunan serta perkembangannya • mengemplementasikan person to person contact. • Bertukar informasi, dan bertukar pengetahuan tentang hal yang baru. • mempererat hubungan emosional • mempromosikan perdamaian • Diharapkan mampu mencegah terjadinya konflik dan meredam ketegangan diantara negara yang bersengketa.
<p>Kolonel Kurniawan</p>	<p>Kerja sama Trilateral Indomalphi merupakan kerja sama yang mengacu pada kerja sama internasional sebelumnya yang telah berhasil dilaksanakan di Selat Malaka yang disebut Malacca Strait Patrol. Mengingat situasi pembajakan yang terjadi di sekitar perairan laut Sulu, oleh karenanya Menteri Pertahanan Ryamizard Ryakudu berinisiatif mengaplikasikan kerangka kerja sama Patroli Selat Malaka di Laut Sulu. Didalam perjanjian trilateral Cooperation ada kerja sama Exercise and Training, Port Visit dan Coordinate Patrol.</p> <p>Dalam kegiatan Port Visit ada kunjungan ke kapal patroli negara lain begitupun sebaliknya. Artinya kita memberikan kepercayaan kepada mereka dan mereka memberikan kepercayaan kepada kita untuk bisa meninjau kapal mereka. Dalam kunjungan tersebut tiap negara juga berkunjung ke MCC masing masing untuk melihat sejauh mana pembangunan serta perkembangan MCC tersebut.</p> <p>Indonesia dengan menawarkan kerja sama ini, tentunya mempromosikan perdamaian. Dengan</p>	

	<p>adanya kerja sama ini diharapkan mampu mencegah terjadinya konflik terbuka antara dua negara Malaysia dan Filipina. Sehingga mampu meredam ketegangan diantara negara yang bersengketa.</p>	
	Mayor Herstyadi	
	<p>Kerja sama Indomalphi sendiri merupakan patroli teregistrasi bersama dimana masing masing negara mengirimkan kapalnya untuk melaksanakan patroli diwilayah perairan masing masing didalam negara tersebut tapi diwilayah yang hampir berbatasan di dalam satu wilayah area <i>maritime interest</i>. Keberadaan unsur keamanan di perairan yang jadi perhatian 3 negara, melalui trilateral maritim patrol diharapkan dapat meningkatkan stabilitas di kawasan tersebut sehingga aktifitas ekonomi dapat berjalan aman dan lancar.</p> <p>Kami sebagai unsur pelaksana dilapangan dibawa koarmada 2 yang melingkupi wilayah kerja Indonesia bagian tengah bersama sama dengan unsur unsur Patroli Malaysia dan Filipina melaksanakan Patroli selama 120 hari dalam kurung waktu 1 tahun. Dalam patroli tersebut yang dilaksanakan diperairan masing masing negara melakukan kordinasi dan komunikasi sehingga terjalin pertukaran informasi diantara</p>	

negara mengenai kondisi dilapangan. Selanjutnya dalam kurung waktu tersebut dilaksanakan kunjungan atau Port Visit Indomalphi di Zamboanga Filipina selama 3 hari. Kegiatan tersebut memiliki beberapa kegiatan seperti Courtesy Call, Melaksanakan Seminar, Diskusi bersama bagaimana meningkatkan kerja sama ini sehingga lebih efektif efisien dalam melaksanakan Indomalphi. Setelah itu prajurit prajurit yang ada didermaga dilakukan beberapa kegiatan seperti olahraga bersama, Fun games, dan juga undangan jamuan makan malam untuk mempererat hubungan antara tiga negara yang semuanya dilakukan secara bergiliran baik itu di Indonesia Filipina dan juga Indonesia.

Dengan adanya tiga negara ini dapat saling bertukar informasi. Ketika ada masalah ataupun kejadian dapat langsung berkomunikasi dengan negara lain dan juga dapat menginformasikan kekapal kapal sipil bagaimana situasi dikawasan tersebut. Pada saat kapal sipil melewati batas wilayah suatu negara. Kita dapat menghubungi kapal negara lain yang sedang berpatroli saat itu sehingga dapat dilakukan semacam pendampingan untuk memastikan keamanan mereka. Saat ini TNI AL memiliki pertemuan berupa Navy to Navy Talk, jadi antar pimpinan angkatan laut berbicara dengan pimpinan

	lainnya untuk membahas apa saja kerja sama yang dapat dibangun kedepannya.	
Bagaimana Strategi diplomasi pertahanan indonesia dalam kerja sama Trilateral port visit indomalphi 2017-2019?	Mayjen Saipul Anwar	<ul style="list-style-type: none"> • Implementasi dari kebijakan pemerintah • Dalam konteks keamanan untuk menyelesaikan masalah bersama dan untuk menunjukkan keseriusan negara kepada pihak internasional. • meningkatkan reputasi Indonesia dimata dunia. • Meningkatkan kemampuan kordinasi dan komunikasi prajurit misalnya dalam hal penguasaan bahasa inggris sebagai bahasa Internasional.
	<p>Kerja sama ini merupakan implementasi dari kebijakan pemerintah untuk menjalin hubungan baik. Pada level prajurit ini bertujuan untuk meningkatkan capacity building, person to person contact. Dalam konteks keamanan untuk menyelesaikan masalah bersama dan untuk menunjukkan keseriusan negara kepada pihak internasional. Karena laut sulu-sulawesi sendiri merupakan jalur lalu lintas perdagangan internasional yang merupakan jalur ketergantungan banyak negara, sehingga juga akan meningkatkan reputasi Indonesia dimata dunia.</p> <p>Sarana dan prasarana yang disiapkan dalam pelaksanaan Trilateral Port Visit Indomalphi pertama, kesiapan unsur yang siap beroperasi, kemudian logistik yang disiapkan termasuk peralatan. Diantara negara negara ASEAN, Indonesia termasuk negara yang memiliki kekuatan militer yang kuat dengan kemampuan sumber daya manusia dan teknologi Alutsista yang tinggi. Dari segi jumlah prajurit serta alutsista yang dimiliki Indonesia memiliki peringkat diatas Malaysia dan juga Filipina. Kemudian secara kemampuan Prajurit TNI</p>	

	<p>memiliki profesionalisme yang tinggi dibanding dengan Malaysia dan Filipina. Namun secara penguasaan teknologi prajurit mereka lebih cepat menangkap karena didukung oleh kemampuan bahasa internasional yang dimiliki.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan kunjungan ke kapal militer serta MCC negara lain, sehingga
	<p>Kolonel Okta Heroe</p>	
	<p>Port Visit sendiri merupakan kerja sama untuk meningkatkan kapasitas dan juga meningkatkan kepercayaan masing masing pasukan. Port visit ini sangat penting karena selama ini tidak ada komunikasi dan ini telah disepakati secara politis ada keputusan pemerintah masing masing melalui menteri Pertahanan yang kemudian di implementasikan melalui Trilateral Maritime Patrol (TMP) yang di sepakati di tarakan dan Trilateral Air Patrol (TAP) yang disepakati di Malaysia serta dilakukan kunjungan Port Visit yang dilakukan tiap tiga kali setahun secara bergantian.</p> <p>Dalam kerja sama adanya peningkatan kapasitas militer Indonesia dalam hal kordinasi, kemudian dalam hal operasi karena ada <i>inter of Probability</i> dari negara satu ke negara lain yang dilakukan secara rutin. Seiring berjalannya waktu tentunya akan meningkatkan kemampuan kordinasi dan komunikasi prajurit misalnya dalam hal penguasaan bahasa inggris sebagai bahasa Internasional. Kemudian ada peningkatan dalam</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mendapatkan informasi tentang kemajuan teknologi militer mereka. • Peningkatan dalam latihan penamkapan • Mengatasi permasalahan berupa ancaman perompakan dan kejahatan maritim lainnya. • Saat Port Visit disediakan berbagai fasilitas, penginapan, pesta kecil kecilan yang dilakukan untuk meningkatkan interaksi, dan komunikasi. Sehingga nantinya saat kunjungan ke negara lain rasa kekeluargaan sudah

	<p>latihan penamkapan perompakan karena dilakukan secara rutin. Sehingga kemampuan prajurit secara individu juga akan bertambah.</p> <p>Dalam hal kekuatan militer sebenarnya tidak bisa diukur dari seberapa banyak jumlah Alutsista yang dimiliki. Karena itu merupakan daya tempur relatif. Dalam kerja sama ini yang diukur adalah kesiapan prajurit, apakah mampu melaksanakan operasi utama, operasi pendukung, ataupun patroli. Dan hingga saat ini Indonesia masih mampu melakukan kerja sama berupa latihan, patroli bersama dengan negara negara khususnya antara Indonesia, Malaysia dan juga Filipina. Ketiga negara juga memiliki kontribusi yang sama. Misalnya dalam hal pertukaran informasi.</p> <p>Kerja sama Trilateral Indomalphi ini sangat penting dalam hal mengatasi permasalahan keamanan di laut Sulu-Sulawesi. Dibeberapa tahun sebelumnya kapal kapal yang melewati kawasan tersebut sering mengalami perompakan. Awak kapal yang sering menjadi korban perompakan maupun penculikan adalah warga negara Indonesia. Jika hal ini terus menerus terjadi tentunya akan berdampak pada kepentingan nasional kita.</p>	<p>terbangun dengan baik.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sarana dan prasarana yang disiapkan yakni kesiapan unsur yang siap beroperasi, kemudian logistik yang disiapkan termasuk peralatan. • Kesiapan prajurit profesional yang telah dibekali pelatihan dan keterampilan dalam melakukan tugas operasi militer. • Dapat meningkatkan kapasitas (Capacity Building/CB) dan juga meningkatkan kepercayaan masing masing pasukan (Confidense Building Mesures/CBMs).
--	--	---

Kolonel Kurniawan	
<p>Menurut Dirjen Strahan Port Visit sendiri merupakan bagian diplomasi pertahanan untuk meningkatkan Confidence building Measure (CBM). Dalam pembentukan kerja sama keamanan Indomalphi, Indonesia yang melakukan inisiatif dikarenakan aksi kejahatan di laut Sulu-sulawesi, Indonesia mendapat dampak paling besar.</p> <p>Port Visit ini dapat mempererat hubungan emosional dengan negara lain dalam rangka pertemuan persahabatan, latihan terbatas, lintas damai dari satu negara ke negara lain secara bergantian, sehingga yang diharapkan kondisi kondusif dan positif untuk melaksanakan kerja sama antar satu negara dengan negara lain. Dalam kerja sama ini awak yang dikirimkan tentunya adalah prajurit yang telah memiliki pengalaman khusus dan juga kapal yang dikirimkanpun kapal generasi terbaru. Dengan teknologi radar canggih. Sehingga ini merupakan ajang gelar kekutan juga.</p> <p>Dalam kerja sama internasional yang menggunakan komunikasi bahasa Inggris tentunya secara tidak langsung akan meningkatkan kemampuan prajurit dari segi komunikasi. Kemudian melakukan port visit dan berkunjung ke kapal militer negara lain, kita akan</p>	

	<p>mendapatkan informasi secara tidak langsung tentang seberapa canggih kapal mereka. Dengan memantau dan mencermati apa apa saja yang disana. Sehingga ini akan meningkatkan naluri intelijen prajurit untuk mengumpulkan data pasukan lainnya. semuanya itu merupakan bagian dari peningkatan capacity building.</p> <p>Kerja sama antara tiga negara terus dikembangkan. Yang pertama membangun MCC. Diharapkan dari masing masing negara melalui MCC tersebut dapat bertukar informasi data data intelijen terkait masalah kemaritiman. Karena jika dikaitkan dengan oprasi militer artinya kita memasuki wilayah teritorial negara lain dan itu ynag kita hindari. Bagi indonsia adalah mengamankan wilayah lautnya.</p> <p>Dengan meningkatkan kemanan di wilayah laut sulu-sulawesi diharapkan tidak ada lagi kejadian seperti pembajakan dan penculikan dengan imblan uang tebusan yang kebanyakan dari warga negara Indonesia. Keamanan wilayah itu dibangun secara bersam sama tidak bisa satu negara mengamankan dirinya sendiri. Dan untuk membangun CBM bisa melalui port visit tersebut dan untuk menunjukkan kemampuan kita (effect deterrence) dengan menampilkan kapal kapal terbaik kita untuk menunjukkan kita mempunyai kekuatan yang lebih.</p>	
--	--	--

	Mayor Herstyadi	
	<p>Perspektif Indonesia melihat Laut Sulu merupakan wilayah kerawanan dari pembajakan ataupun perompakan yang berada di teritorial maupun ZEE dari Filipina, sehingga dari perspektif Indonesia peran terbesar berada pada negara Filipina untuk mendapat mengatasi kelompok yang mendiami kepulauan sulu. Namun Indonesia semaksimal mungkin mendukung dan melindungi <i>sea line of Communication</i> demi terciptanya keamanan kelancaran jalur jalur perdagangan dan transportasi yang melalui wilayah tersebut. Jadi tidak menutup kemungkina bahwa Indonesia memiliki kepentingan di wilayah tersebut.</p> <p>Dalam kerja sama Trilateral Port Visit Indomalphi tiap negara memiliki Kontribusi yang sama untuk kesuksesan terselenggaranya kegiatan ini. Sehingga dalam pelaksanaan patroli bersamapun di wilayah negara masing masing yang memiliki kemungkinan beroperasinya aksi perompakan dan kelompok kriminal ini dapat mencangkup seluruh area operasi. Jadi dalam pertukaran informasipun dapat berjalan cepat dan baik. Harapannya dengan kerja sama ini dapat menjaga kemanan wilayah yang menjadi perhatian bersama antara 3 negara disekatarwilayah perairan laut sulu-sulawesi.</p>	

Kemampuan prajurit sudah sangat profesional, dimana TNI AL memiliki pola pembinaan personil yang sudah baik dan kedepan semakin membaik dengan terus meningkatkan profesionalisme dan juga kesejahtraan prajurit. Dengan kesejahtraan yang telah diberikan negara, prajurit TNI memiliki tanggung jawab moril untuk membangun bangsa. Jadi, ketika pelaksanaan latihan bersama, prajurit TNI dapat melaksanakan kegiatan dengan baik dan juga berkomunikasi dengan baik.

Karena melihat perkembangan teknologi angkatan laut yang sangat dinamis. Jadi negara yang sudah merasa puas dengan apa yang dimiliki akan tertinggal. Karena saat ini setiap negara terus berkompetisi mengembangkan senjata maupun alutsista melalui Industri pertahanannya. Saat ini industri pertahanan Indonesia seperti PT. Pindad, PT dirgantara, PT PAL, maupun Industri lainnya sudah berkembang dengan sangat baik. Apalagi dituntut dalam kebijakan kemandirian Industri pertahanan dalam negeri sehingga diharapkan generasi muda dapat berkontribusi dalam membangun teknologi khususnya dibidang pertahanan demi melindungi keselamatan, keutuhan wilayah dan kedauatan negara.

Dengan negara lain juga bagaimana kita bisa bekerja sama berbicara, merencanakan dengan

	<p>waktu yang sangat singkat yang juga memperhatikan faktor keamanan sehingga hal hal yang tidak diinginkan tidak terjadi.</p> <p>Dalam kegiatan Port Visit Indomalphi, antusiasme dari tiap tiap kontingen negara sangat di setiap kunjungan baik saat kunjungan ke Indonesia, Malaysia maupun di Filipina. Dalam kunjungannya di Indonesia disediakan berbagai fasilitas, penginapan, pesta kecil kecilan yang semua itu dilakukan untuk meningkatkan interaksi, dan komunikasi. Sehingga nantinya saat kunjungan ke negara lain rasa kekeluargaan sudah terbangun dengan baik. Jadi dalam kegiatan tersebut rasa saling percaya dapat tercipta dan dapat juga meningkatkan koordinasi, dan komunikasi yang diharapkan akan berdampak pada keefektifan dalam melakukan pengamanan di Laut-Sulawesi.</p>	
--	---	--

4.4 Hasil Interpretasi Data

Pada Sub-bab Ini Peneliti melakukan pemaknaan dari data yang terkumpul untuk mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan penelitian yang diajukan.

4.4.1 Kerja Sama Trilateral Port Visit Indomalphi

Laut Sulu-Sulawesi menjadi perhatian banyak negara dikarenakan kasus kejahatan wilayah tersebut telah meningkat utamanya kasus pembajakan kapal pada tahun 2016. Hal tersebut memaksa negara negara littoral State yakni Indonesia Malaysia dan juga Filipina membangun adanya

suatu kerja sama pertahanan yang disebut Kerja sama trilateral Indomalphi. Kerja sama tersebut merupakan Inisiatif Indonesia dalam mengatasi permasalahan di laut sulu. Hal ini memberikan penafsiran bahwa Indonesia tetap memiliki komitmen untuk ikut serta menjaga perdamaian dunia sesuai dengan amanat UUD 1945.

Pada dasarnya Indonesia terbuka secara luas dengan berkontribusi dalam kerja sama multilateral dengan negara-negara lain untuk terciptanya kawasan yang stabil, aman, dan damai. Posisi tersebut merupakan komitmen Indonesia untuk ikut serta menjaga perdamaian dunia. Sebagai negara yang memiliki kawasan strategis, Indonesia Malaysia dan juga Filipina rentan terhadap sejumlah gangguan keamanan yang sering mempengaruhi kepentingan nasional negara tersebut. Oleh karenanya pembentukan kerja sama pertahanan diantara negara perlu dibangun.

Kerja sama yang telah dibangun sebelumnya dimana dalam penelitian Ramadhan (2017) dengan judul *“Kerja Sama Pertukaran Informasi Indonesia-Filipina Dalam Menghadapi Terorisme di Wilayah Perbatasan Indonesia-Filipina”*. Dinyatakan bahwa Implementasi dari diplomasi pertahanan Indonesia berupa pertukaran informasi dengan Filipina untuk menghadapi ancaman terorisme perlu ditingkatkan. Artinya dapat dipahami bahwa perlu adanya pengembangan kerja sama dalam menangani aksi kejahatan transnasional seperti pembajakan maupun terorisme yang ada dikawasan kedua negara.

Sebagai ancaman transnasional yang melintasi batas negara tentu tidak bisa dituntaskan oleh satu negara saja. Diperlukan adanya kerja sama keamanan baik dalam bingkai kerja sama bilateral ataupun multilateral. Mengingat ketiga negara Indonesia, Malaysia serta Filipina merupakan anggota ASEAN, maka peran dari kerja sama menjadi penting untuk

dianalisis lebih dalam sebagaimana peranannya dalam mengatasi masalah di perairan Asia Tenggara.

Berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat dalam bingkai kerja sama Trilateral Indomalphi ketiga negara berkomitmen bekerja sama untuk berpatroli menjaga perairan dari tindak kejahatan, misalnya, perompakan, atau penyelundupan. Dalam Kerja sama tersebut juga memuat prinsip ASEAN way dimana setiap negara tidak berhak ikut campur urusan nasional negara lain. Hal ini mendeskripsikan bahwa tiap negara tetap berpedoman pada kerja sama pertahanan yang memuat prinsip-prinsip yang mencakup norma dan standar yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap penandatanganan dokumen kerja sama.

Kerja sama Trilateral Indomalphi merupakan kerja sama yang mengacu pada kerja sama internasional sebelumnya yang telah berhasil dilaksanakan di Selat Malaka. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Adiputro (2017) dengan judul "*Efektivitas Malacca Strait Patrol dalam Mengatasi Pembajakan dan Perampokan Bersenjata di Perairan Selat Malaka (2009-2014)*". Juga menyebutkan bahwa Patroli Selat Malaka telah berhasil dan efektif dalam memerangi perompakan bersenjata di Selat Malaka berdasarkan indikator efektifitas sumber atau masukan pendekatan, pendekatan proses, dan pendekatan target atau keluaran. Selain itu dalam penelitian tersebut menyebutkan angka penurunan aktifitas kejahatan transnasional secara signifikan.

Selama dalam melakukan Port Visit prajurit TNI melakukan kegiatan seperti *Courtesy Call*, Melaksanakan Seminar, Diskusi bersama. Setelah itu prajurit prajurit yang ada didermaga dilakukan beberapa kegiatan seperti olahraga bersama, *fun games*, dan juga undangan jamuan makan malam yang dilanjutkan dengan penampilan budaya masing masing negara. Dengan adanya port visit diharapkan dapat berimplikasi terhadap peningkatan kerja sama keamanan wilayah yang menjadi perhatian bersama antara 3 negara disekitar wilayah perairan tersebut.

4.4.2 Strategi Diplomasi Pertahanan dalam Kerja Sama Trilateral Port Visit Indomalphi

Kebijakan pertahanan negara yang dibangun untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman merupakan bentuk keseriusan negara dalam mencapai kepentingan nasionalnya. Perwujudan pertahanan negara diharapkan mampu menghadapi ancaman, mampu berperan dalam menciptakan perdamaian dunia berdasarkan politik bebas aktif, mewujudkan industri pertahanan yang kuat, mandiri dan berdaya saing serta kesadaran bela negara. Implementasi kebijakan Nasional Indonesia sebagai Poros Maritim dunia merupakan perwujudan sebuah negara maritim yang maju, berdaulat, mandiri, kuat, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan perdamaian kawasan dan dunia sesuai dengan kepentingan nasional.

Dalam kasus pembajakan yang terjadi di Laut Sulu peran terbesar berada pada negara Filipina. Namun, Indonesia sebagai negara menjunjung tinggi perdamaian dunia semaksimal mungkin mendukung dan melindungi keamanan kelancaran jalur jalur perdagangan dan transportasi yang melalui wilayah tersebut. Kerja sama yang dibangun dalam rangkaian kegiatan Port Visit Indomalphi merupakan bagian dari strategi diplomasi pertahanan Indonesia dalam upaya untuk mewujudkan keamanan regional. Dalam Penelitian yang dilakukan oleh Amal (2018) dengan judul *“Peran Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Trilateral Maritime Patrol Indomalphi”*. Juga menyatakan bahwa Kerja sama trilateral maritime patrol Indomalphi merupakan salah satu implementasi diplomasi pertahanan Indonesia yang mendukung ASEAN Security Community dalam mencapai keamanan regional.

Pada Strategi Pertahanan Negara disebutkan bahwa sumber daya pertahanan nasional bertransformasi menjadi elemen kekuatan nasional yang terdiri dari unsur kekuatan pertahanan militer dan nir-militer.

Pemberdayaan potensi pertahanan ditujukan agar mendukung transformasi sumber daya dan sarana yang dimiliki. Pembangunan sarana dan prasarana demi menunjang peningkatan kerja sama melalui pertukaran informasi antara tiga negara terus diupayakan. Misalnya, dengan membangun Maritime Command Centre (MCC).

Berdasarkan hasil hasil penelitian yang dilakukan oleh Lukman Yudho Prakoso dan Suhirwan dengan judul *Sea Defense Strategy and Urgency of Forming Maritime Command Center* bahwa strategi dalam pengamanan ALKI II yaitu dengan pembangunan Pusat Komando Maritim (MCC) dengan menempatkan Pangkalan Angkatan Laut Indonesia di masing-masing Wilayah Maritim Indonesia sebagai Pusat Komando digunakan sebagai optimalisasi faktor komunikasi. (Prakoso & Suhirwan, 2020).

Selain itu elemen kekuatan negara dalam pelaksanaan kerja sama pertahanan adalah kesiapan unsur personil yang harus terus ditingkatkan. Saat ini TNI memiliki pola pembinaan personil yang sudah baik dan kedepan semakin membaik dengan terus meningkatkan profesionalisme dan juga kesejahteraan prajurit. TNI sebagai garda terdepan pertahanan negara sesuai yang diamanatkan dalam UU 34 tahun 2004 tentang tugas tentara nasional Indonesia yang tertuang dalam pasal 7 memiliki kewajiban untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara kesatuan republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Dalam mekanisme Port Visit Indomalphi, prajurit TNI angkatan laut sesuai dalam UU no. 34 tahun 2004 dalam pasal 9 TNI-AL bertugas melaksanakan tugas diplomasi sebagai alat untuk mendukung kebijakan

pemerintah sehingga pelaksanaan diplomasi TNI AL ini kemudian menjadi tugas penting bagi TNI-AL agar dapat mendukung pemerintah untuk mencapai tujuan nasional. Peran TNI AL juga tergambar dalam Penelitian Sipahutar (2017) dengan judul "*Strategi Diplomasi pertahanan Indonesia melalui multilateral Naval Exercise Komodo dalam konflik Laut Cina Selatan*". Dalam Penelitian tersebut disebutkan bahwa strategi diplomasi pertahanan Indonesia melalui *Multilateral Naval Exercise Komodo*, efektif sebagai suatu strategi diplomasi pertahanan Indonesia untuk mereduksi Konflik perbatasan Laut Cina Selatan. Artinya TNI-AL memiliki peranan dalam melakukan aktifitas diplomasi maritim yang merupakan bagian dari Diplomasi Pertahan Indonesia.

Dalam mekanismenya prajurit TNI angkatan laut ketika memasuki suatu wilayah perairan negara lain akan disambut angkatan laut mereka dan saat itu sudah melakukan latihan bersama sama, seperti latihan lintas melintas, komunikasi, dan latihan menangkap prompak secara bersma sama. Dalam kerja sama tersebut adanya peningkatan kapasitas militer Indonesia dapat dilihat dalam hal kordinasi, kemudian dalam hal operasi, karena ada *inter of Probability* dari negara satu ke negara lain yang dilakukan secara rutin. Seiring berjalannya waktu tentunya akan meningkatkan kemampuan kordinasi dan komunikasi prajurit misalnya dalam hal penguasaan bahasa asing. Kemudian ada peningkatan dalam latihan penangkapan perompakan karena dilkakukan secara rutin. Sehingga kemampuan prajurit secara individu juga akan bertambah. Dari beberapa rangkaian pernyataan diatas dapat dikatakan bahwa kerja sama tersebut merupakan bagian dari instrumen Diplomasi pertahanan sebagai bagian dari peningkatan *Capacity Building*.

Selain itu dalam kunjungan Port Visit di Indonesia disediakan berbagai fasilitas, penginapan, pesta kecil kecilan yang semua itu dilakukan untuk meningkatkan interaksi, dan komunikasi. Sehingga nantinya saat kunjungan ke negara lain rasa kekeluargaan sudah terbangun dengan baik.

Seperti halnya yang dirasakan Mayor Hersyahadi bahwa Antusiasme dari tiap tiap kontingen negara terlihat bersemangat di setiap kunjungan baik saat kunjungan ke Indonesia, Malaysia maupun di Filipina. Sehingga dapat dipahami bahwa dalam kerja sama ini dapat meningkatkan hubungan rasa saling percaya (CBM) yang merupakan bagian dari Instrumen Diplomasi Pertahanan.

4.5 Pembahasan

Sub-bab ini menjelaskan tentang pembahasan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

4.5.1 Analisis Kerja Sama Trilateral Port Visit Indomalphi

Berdasarkan hasil interpretasi serta data yang diperoleh dari narasumber, keterlibatan Indonesia pada berbagai forum kerja sama baik di global maupun regional merupakan bagian masyarakat Internasional yang sejalan dikatakan Amitav Acharya dalam L.A. Swatuk (2013), bahwa bagi negara-negara dunia ketiga seperti Indonesia melakukan pendekatan keamanan sesuai Cooperative Approach adalah pendekatan berdasarkan

kebiasaan yang dilakukan untuk membangun kerja sama sebagai suatu strategi dalam menyelesaikan konflik. Pendekatan ini berupaya untuk mempromosikan regionalisme sebagai cara mengendalikan atau mencegah konflik. Seperti yang dilakukan di Filipina Indonesia berperan dalam penyelesaian konflik politik di negara tersebut dengan mengirim pengamat militer yang tergabung dalam International Monitoring Team (IMT) diperjanjian damai Moro Islamic Liberation Front (MILF).

Meningkatnya perkembangan lingkungan strategis yang semakin kompleks, interaksi aktor-aktor internasional menciptakan kerentanan timbal balik sehingga kerjasama internasional semakin diperlukan untuk mengatasinya (Jemadu, 2014, p. 109). Hal ini mendorong Indonesia untuk membentuk serta mengembangkan kerja sama dibidang pertahanan untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Pembangunan di bidang kerja sama pertahanan diarahkan pada pada kebijakan politik luar negeri bebas aktif baik secara bilateral maupun multilateral untuk mencerminkan jati diri sebagai negara kepulauan sekaligus negara maritim.

Kejahatan transnasional saat ini dipandang sebagai suatu ancaman terhadap keamanan global. Di lingkungan Asia Tenggara, kejahatan transnasional dianggap sebagai ancaman serius yang dapat mempengaruhi stabilitas kawasan. Sesuai dengan program ASEAN dalam menghadapi ancaman kejahatan lintas negara (Programme to Implement the ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crime). Perkembangan ancaman ini tumbuh secara masif dari dalam suatu wilayah yang berkelompok maupun kriminal yang terorganisasi yang memiliki ideologi yang bertentangan dengan konstitusi negaranya. Mengingat fenomena kejahatan ini berdampak besar pada stabilitas keamanan negara, oleh karenanya Indonesia senantiasa terlibat pada usaha penegakan hukum serta melindungi warga negara dari berbagai macam ancaman.

Sebagaimana yang dikatakan sebelumnya bahwa masalah ini tidak dapat diselesaikan oleh satu negara saja. Dibutuhkan kerja sama keamanan baik dalam cakupan bilateral maupun multilateral dalam menanganinya. Mengingat ketiga negara Indonesia, Malaysia dan Filipina adalah anggota ASEAN, maka peran dari kerja sama menjadi penting untuk dikaji lebih jauh bagaimana peranannya dalam mengatasi masalah di perairan Asia Tenggara. Hal ini juga sejalan yang dikatakan Buzan & Wæver (2003) dalam buku *Regions and Power* dimana untuk menjaga keamanan Regional diperlukan kerja sama diantara negara. Ditambah dengan kedekatan dan keragaman geografis menghasilkan sebuah pola regional yang berdasar kepada kelompok, di mana kondisi keamanan yang saling bergantung menjadi lebih kuat di antara negara-negara yang ada di dalam complexes dibandingkan dengan yang berada di luarnya.

kerja sama keamanan dibidang kemaritiman memiliki kontribusi dalam menjaga keamanan serta stabilitas kawasan. Tiap negara yang berada dalam satu lingkungan kawasan pada dasarnya memiliki kepentingan yang sama, yakni bertujuan untuk mengatasi ancaman yang bersifat transnasional serta mengganggu keamanan kawasan. Jika kerja sama dua negara hanya berdasar pada *aligned interests*, maka di sektor regional keamanan maritim lebih menekankan kasus yang berdampak signifikan serta menjadi perhatian negara negara di kawasan tersebut. Oleh karenanya, penting bagi Indonesia dalam memahami serta mengidentifikasi persamaan pandangan tiap negara (Cassidy et al., 2016, p. 9).

Kerja sama ditujukan demi terwujudnya stabilitas kawasan yang damai melalui usaha bersama tiap negara dan menjunjung tinggi hak serta kedaulatan masing-masing negara. Indonesia berinisiatif melaksanakan kerja sama trilateral Indomalphi merupakan bentuk respon Indonesia menghadapi perompak bersenjata dan kejahatan transnasional serta terorisme di kawasan laut Sulu-Sulawesi yang berpotensi mengancam

keselematan bangsa, dan mempengaruhi lalu lintas perdagangan serta kegiatan prekonomian yang menimbulkan kerugian bagi kesejahteraan kawasan.

Indonesia memiliki komitmen untuk menciptakan perdamaian dunia yang berdasar asas persamaan hak dan kedudukan, menghargai kedaulatan masing masing negara, dan tidak mencampuri urusan dalam negeri masing masing. Komitmen ini berdasarkan cara pandang bangsa Indonesia terkait perdamaian, dimana tiap negara negara berbondong bondong, saling merangkul untuk menciptakan rasa aman diantar negara tersebut. kontribusi Indonesia sebagai mitra strategis masyarakat internasional dilaksanakan melalui upaya upaya perdamaian dalam rangka membangun kepercayaan dunia.

Usaha mempromosikan perdamaian serta stabilitas baik dalam tataran regional maupun global dilaksanakan melalui kegiatan diplomasi yang menjamin kepentingan nasional bangsa. Kerja sama Internasional seperti yang dijabarkan Supriyatno (2014, p. 153), bertujuan untuk memperoklamirkan perdamaian serta stabilitas keamanan global maupun regional, mempromosikan hubungan yang ramah dan bersahabat, mempererat serta membangun dan menetapkan suatu kerangka kerja guna meningkatkan hubungan antar negara di bidang pertahanan dan keamanan.

Berdasarkan uraian diatas dalam kerja sama Port Visit tersebut dilakukan beberapa rangkaian kegiatan seperti *Courtesy Call*, Melaksanakan Seminar, Diskusi bersama bagaimana meningkatkan kerja sama ini sehingga lebih efektif efisien. Setelah itu prajurit prajurit yang ada didermaga dilakukan beberapa kegiatan seperti olahraga bersama, *fun games*, dan juga undangan jamuan makan malam yang dilanjutkan dengan penampilan budaya masing masing negara. Hal tersebut diperuntukkan untuk mempererat hubungan antara tiga negara yang semuanya dilakukan

secara bergiliran baik itu di Indonesia Filipina dan juga Indonesia. Dalam latihan tersebut adanya media yang meliput, juga secara tidak langsung mempromosikan perdamaian diantara masing masing negara.

Selain itu ada beberapa prinsip yang terdiri dari norma norma yang wajib dipatuhi serta dilaksanakan dalam kerja sama pertahanan, yaitu: Saling menghormati kedaulatan masing masing negara, tidak saling mencampuri urusan dalam negeri, bekerja sama untuk saling mendapat keuntungan, hidup damai secara berdampingan, serta dilarang melakukan kegiatan agresi. Dari beberapa prinsip diatas secara tidak langsung ketiga negara yang tergabung dalam organisasi kenegaraan ASEAN telah mengimplementasikan ASEAN way dimana dalam kesepakatannya ketiga negara sepakat bahwa dalam kegiatan *trilateral maritime Patrol* personil militer tidak diizinkan melewati batas negara lain kecuali dalam melakukan pengejaran terhadap para pembajak namun tetap harus dalam kerangka koordiansi dengan kawasan negara yang bersangkutan.

Menurut I Halina dalam Rahmanto (2017), prinsip non-intervensi adalah prinsip dalam menjamin pengakuan kedaulatan suatu negara, serta jaminan perlindungan dari campur tangan suatu negara anggota terhadap politik dalam negeri negara lainnya. Amitav Acharya dalam Rahmanto (2017) berpendapat bahwa prinsip tersebut memberikan kebebasan untuk setiap negara dalam mengatasi permasalahan dalam negerinya tanpa adanya campur tangan dari negara yang tentunya akan mencederai norma kebebasan, kemerdekaan serta integritas satu negara. Melalui dialog dan konsultasi, Indonesia berusaha menjadi fasilitator dalam menangani konflik yang timbul diantara negara. Dengan menjunjung tinggi kerja sama, serta prinsip regionalisme, Indonesia berkomitmen dalam mencari solusi damai ditiap permasalahan yang ada. Pilar *Trilateral Maritime Patrol* mencerminkan kerja sama yang nyata serta praktis yang menyentuh permasalahan yang dihadapi.

Sehingga dapat dipahami bahwa peran dan kontribusi dalam merespon permasalahan, Indonesia memiliki komitmen untuk menjalin kemitraan strategis, mengedepankan kesamaan hak serta menciptakan keseimbangan yang dinamis dengan ketiadaan dominasi suatu negara dalam satu kawasan. Hal tersebut dilaksanakan berdasarkan prinsip serta keyakinan untuk mewujudkan kemajuan kerja sama suatu negara. Oleh karena itu Harapannya dengan kerja sama ini dapat menjaga keamanan wilayah yang menjadi perhatian bersama antara 3 negara disekitar wilayah perairan tersebut. Keuntungan Indonesia sendiri sebagaimana yang diamanatkan dalam UU yaitu memberikan kewenangan untuk menjaga keselamatan seluruh warga negara Indonesia yang merupakan tanggung jawab keamanan bagi seluruh rakyatnya.

4.5.2 Analisis Strategi Diplomasi Pertahanan dalam Kerja Sama Trilateral Port Visit Indomalphi

Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Kerja Sama Trilateral Port Visit Indomalphi dapat dianalisis menggunakan teori strategi dari Lykke (1997), Clausewitz (2007), maupun rumusan strategi pertahanan negara dalam Buku pertahanan yang dalam teorinya dibagi menjadi tiga elemen sebagai penyusun strategi. Elemen elemen tersebut meliputi Ends (tujuan), Means, (cara mencapai tujuan) dan Means (sarana dan prasarana yang disiapkan dalam mencapai tujuan). Dari pengertian strategi yang didefinisikan beberapa ahli dan dari Buku Putih Pertahanan tahun 2015 menjelaskan bahwa strategi adalah serangkaian tindakan yang berkaitan dengan mencapai tujuan, melibatkan seluruh elemen kekuatan, dan adanya peranan politik untuk menerangkan tujuan dari strategi tersebut untuk melindungi segenap bangsa dan mencapai kepentingan nasional. Dengan tiga hal penting dalam merumuskan strategi tersebut, maka dalam pembahasan analisis strategi Diplomasi pertahanan Indonesia dalam kerja sama trilateral Port Visit Indomalphi, peneliti membaginya dalam 3 sub materi.

4.5.2.1 Ends

Pertahanan negara dibentuk dalam suatu sistem pertahanan dengan mengedepankan kepentingan nasional. Diplomasi pertahanan Indonesia merupakan salah satu strategi pertahanan negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya yang dilakukan melalui pola kerja sama antar negara. Penyelesaian permasalahan yang berkaitan dan memengaruhi pertahanan negara, diarahkan dengan menjalin diplomasi yang diperkuat oleh kekuatan militer modern.

Dalam penelitian ini teori pertahanan digunakan sebagai alat untuk menjawab peran militer dan non-militer dalam menghadapi fenomena perkembangan ancaman pertahanan. Ilmu pertahanan mengkaji suatu aspek yang berhubungan dengan keamanan negara dan menjadikan perilaku negara dalam menghadapi ancaman sebagai objek. Ilmu pertahanan juga bersifat universal dan menjadi kebutuhan institusi-institusi militer maupun nonmiliter dalam menghadapi ancaman. Saat ini ancaman yang ada telah mempengaruhi seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara serta berpotensi mengancam kepentingan nasional (Gumilar, 2015, pp. 6–8).

Kepentingan nasional dijadikan pedoman dalam menyusun suatu kebijakan dalam merumuskan sistem pertahanan yang dibingkai dalam strategi keamanan nasional. Keamanan nasional adalah kondisi bagi terciptanya kelancaran pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan tujuan nasional. Indonesia merupakan negara kepulauan mendayagunakan wilayah laut sebagai sebagai lalu lintas kemajuan prekonomian bangsa namun hal tersebut mengakibatkan kerentanan pada perselisihan batas negara serta ancaman nir militer ada di kawasan. Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki kepentingan dalam menciptakan kestabilan kawasan,

dalam rangka mendukung kepentingan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia (PMD).

Kebijakan Nasional Indonesia yang dikeluarkan oleh presiden Joko Widodo yang memiliki Visi misi kelautan sebagai Poros Maritim dunia adalah perwujudan sebuah negara maritim yang memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan perdamaian kawasan dan dunia sesuai dengan kepentingan nasional. Oleh karena itu, tata kelola sumber daya alam, wilayah perbatasan, dan pertahanan yang handal sangat diperlukan, salah satunya kawasan laut Sulu-Sulawesi.

Indonesia semaksimal mungkin mendukung dan melindungi *sea line of Communication* demi terciptanya keamanan kelancaran jalur jalur perdagangan dan transportasi yang melalui wilayah tersebut. Adanya interaksi yang terjadi antar negara memosisikan suatu negara terus berkontribusi dalam mendorong terwujudnya suatu keamanan internasional yang juga menguntungkan posisi pertahanan tiap negara. Melalui kerja sama trilateral antara tiga negara, diharapkan mampu mengatasi ancaman keamanan serta memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan pertahanan negara yang turut dirasakan oleh dunia internasional utamanya dalam membangun hubungan antarnegara yang harmonis, dinamis, dan damai.

Kerja sama yang telah dibangun ini adalah bagian dari sistem pertahanan negara yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2002 yang menyebutkan bahwa Pertahanan Negara adalah upaya demi mempertahankan kedaulatan Negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara. Hal ini menunjukkan bahwa pertahanan adalah suatu kebutuhan nasional yang utama sejak suatu negara mendapat pengakuan kedaulatan.

Perubahan terhadap paradigma pandangan terhadap kawasan perairan laut melalui kebijakan tersebut dapat menjadi suatu kekuatan yang menguntungkan Indonesia untuk mencapai kepentingan Nasionalnya dan demi membangun Laut Indonesia menjadi lebih aman dan kuat. Selanjutnya hal tersebut sejalan dengan tujuan nasional Indonesia yang tercantum di dalam Pembukaan UUD NRI 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Khususnya tujuan ikut melaksanakan ketertiban dunia, Indonesia berkewajiban untuk menciptakan lingkungan yang aman dan damai, baik di lingkungan global maupun dalam negeri.

4.5.2.2 Means

Pada Strategi Pertahanan Negara disebutkan bahwa sumber daya pertahanan nasional bertransformasi menjadi elemen kekuatan nasional yang terdiri dari unsur kekuatan pertahanan. Pemberdayaan potensi pertahanan diarahkan untuk dapat mendukung transformasi sumber daya dan sarana prasarana nasional (Kemenhan RI, 2015). Pembangunan kekuatan pertahanan ditujukan sebagai usaha pencapaian standar profesionalisme angkatan bersenjata, yang didasarkan pada visi-misi, serta kebijakan Poros Maritim Dunia (PMD).

Dalam hal mewujudkan kebijakan PMD, Pemerintah perlu membangun kekuatan pertahanan maritim yang didukung teknologi yang canggih. Secara bertahap Indonesia akan meningkatkan kapabilitas pertahanan negara yang memiliki daya tangkal melalui pembangunan postur dengan membangun sarana dan prasarana demi menunjang peningkatan kerja sama melalui pertukaran informasi antara tiga negara. Salah satunya dengan membangun Maritime Command Centre (MCC). Hal tersebut selaras dengan pembangunan nasional yang diarahkan sesuai kebijakan pertahanan negara, termasuk pembangunan kawasan

perbatasan serta pulau-pulau kecil terluar dan terdepan demi terwujudnya postur pertahanan negara yang kuat. Pembangunan wilayah pertahanan diharapkan mampu menghadapi berbagai ancaman, dan menunjang keamanan kawasan perbatasan negara, wilayah maritim, darat, dan termasuk wilayah kerdigantaraan.

Dalam Port Visit Indomalphi TNI-AL bertugas melaksanakan tugas diplomasi sebagai alat untuk mendukung kebijakan politik luar negeri pemerintah sehingga pelaksanaan diplomasi TNI AL ini kemudian menjadi tugas penting bagi TNI-AL agar dapat mendukung pemerintah untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana yang disebutkan dalam UU No. 34 tahun 2004. Diplomai dalam kerangka kemaritiman atau yang disebut diplomasi maritim merupakan istilah yang digunakan dalam berbagai aktivitas di wilayah perairan dimana Angkatan Laut bertindak sebagai gugus tugas pelaksana kegiatan. Hal lain juga disebutkan bahwa diplomasi maritim disamakan dengan diplomasi angkatan laut.

Menurut Laksamana (purnawirawan) Marsetio (2014), Diplomasi angkatan laut (Naval Diplomacy) yang dilaksanakan oleh Prajurit AL berada pada bingkai kebijakan luar negeri. Penyebaran kekuatan laut dalam hal ini kapal perang senantiasa diarahkan dalam mendukung kebijakan luar negeri pemerintah. Selanjutnya, kesesuaian antara kebijakan luar negeri serta kebijakan pertahanan menjadi hal yg penting, khususnya dalam pemanfaatan Angkatan laut menjadi instrumen diplomasi negara. Mengacu pada praktik serta pengalaman di negara-negara maju, benang merah tadi bisa tercipta karena adanya seni manajemen keamanan nasional. dengan kata lain, diplomasi Angkatan bahari dituntun sang strategi keamanan nasional.

Konsep diplomasi maritim dapat menjelaskan bahwa perubahan akan perkembangan kekuatan maritim tidak hanya pada pengembangan kekuatan militer, melainkan adanya perkembangan pada kekuatan

diplomasi yang melibatkan kementerian dan lembaga lainnya yang mendukung terbentuknya kekuatan dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara. Pada penelitian ini konsep diplomasi maritim akan menganalisa kekuatan diplomasi maritim Indonesia dalam mencapai kepentingan nasional melalui kerja sama trilateral Indomalphi, sehingga tujuan diplomasi maritim Indonesia menjadi semakin memberikan perlindungan yang tidak hanya pada kekuatan militer, tapi mampu juga melindungi dari ancaman yang juga semakin berkembang dan dapat mewujudkan kebijakan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Hal tersebut menunjukkan selama beberapa dekade TNI-AL telah mengambil peran melalui aktivitas operasional dan kerjasama antar matra AL di kawasan, dapat dikatakan penggunaan diplomasi TNI AL oleh Indonesia bukanlah sesuatu yang baru. Mengutip pernyataan Djumala pada (Putra, 2017, p. 6), bagi Indonesia, diplomasi pertahanan berperan penting dalam memperoleh pencapaian visi-misi maritim, baik kedaulatan, keamanan, maupun kesejahteraan. Diplomasi pertahanan dalam hal ini menjadi sebuah sarana bagi Indonesia untuk mencapai berbagai kepentingan baik dari sisi internal maupun eksternal.

4.5.2.3 Ways

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan strategi Diplomasi Pertahanan untuk menggambarkan tujuan dari kerja sama Port Visit tersebut. Sebagaimana yang dikatakan Supriyatno (2014) bahwa Diplomasi pertahanan merupakan suatu strategi bagaimana mengelola hubungan internasional tiap negara dalam mewujudkan cita-cita nasional suatu negara dengan melaksanakan aktivitas negosiasi khususnya mengkaji bidang pertahanan.

Implementasi kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas aktif diterapkan pada sikap yang diambil dengan membentuk kerjasama yang melibatkan seluruh instrumen kekuatan negara, baik politik, ekonomi dan

militer. Termasuk salah satunya dengan menerapkan kegiatan diplomasi yang menggunakan sektor militer atau yang disebut diplomasi pertahanan. Menurut Hans J. Morgenthau pentingnya diplomasi untuk menjaga perdamaian internasional, karena diplomasi untuk mencapai tujuan utamanya yaitu memajukan kepentingan nasional dengan sarana perdamaian (Morgenthau, 1973).

Pada implementasinya, diplomasi pertahanan Indonesia bukan ditujukan untuk membentuk pakta pertahanan, tetapi diterapkan lebih ke arah peningkatan rasa saling percaya (*Confidence Building Measure*), *information sharing*, dan peningkatan kapasitas pertahanan (Simamora, 2013, p. 151). Cottey & Foster (2004, p. 16) menambahkan, kerja sama militer dapat memainkan sebuah peran politik primer yang bertindak sebagai sebuah simbol dari kesediaan satu pihak untuk melanjutkan kerja sama pada ranah yang lebih luas, saling percaya, serta berkomitmen untuk bekerja untuk mengatasi atau mengelola perbedaan. Upaya Indonesia menginisiasi kerja sama trilateral Port Visit Indomalphi merupakan hasil dari rasa saling diantara negara.

Kerja sama Trilateral Port Visit Indomalphi adalah salah satu rangkaian kegiatan kunjungan prajurit suatu negara ke negara lain dalam rangka peningkatan kordinasi serta pertukaran Informasi terkait pengamanan Laut Sulu-Sulawesi. Dalam mekanisme Port Visit Indomalphi, prajurit TNI angkatan laut ketika memasuki suatu wilayah perairan negara lain akan disambut angkatan laut mereka dan saat itu sudah melakukan latihan bersama sama. Seperti latihan latihan lintas melintas, komunikasi, latihan menangkap prompak secara bersma sama. Dari kegiatan tersebut, menurut Kolonel Kav Oktaheroe Ramal, S.IP, M.SC dalam wawancara 21 Januari 2021 akan berdampak pada peningkatan *Capacity Building* yang akan berkembang pada level kebijakan misalnya kementerian yang terkait.

Ia menambahkan bahwa dalam kerja sama ini adanya peningkatan kapasitas militer Indonesia dalam hal koordinasi, kemudian dalam hal operasi karena ada *inter of Probability* dari negara satu ke negara lain yang dilakukan secara rutin. Seiring berjalannya waktu tentunya akan meningkatkan kemampuan koordinasi dan komunikasi prajurit misalnya dalam hal penguasaan bahasa asing. Kemudian ada peningkatan dalam latihan penangkapan perompakan karena dilakukan secara rutin. Sehingga kemampuan prajurit secara individu juga akan bertambah.

Seperti dikatakan Grindle (1997) bahwa pengembangan kapasitas merupakan proses yang dialami individu, kelompok, dan organisasi untuk mengolah kemampuan pada pelaksanaan fungsi serta pencapaian hasil yang diinginkan. Capacity Building bisa memberi penekanan dalam dua hal penting yaitu; pengembangan kapasitas sebagian besar seperti proses pertumbuhan serta pengembangan internal, dan juga upaya-upaya pengembangan kapasitas dapatlah berorientasi pada hasil. Sebagai salah satu karakter dalam diplomasi pertahanan, capacity building berfungsi untuk meningkatkan kapasitas pertahanan negara seperti dalam pembangunan kekuatan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui berbagai bentuk pendidikan dan pelatihan seperti halnya latihan bersama baik secara bilateral maupun multilateral for training purpose.

Selain itu kerja sama Port Visit Indomalphi berdasarkan ungkapan dari Dirjen Strahan Mayjen TNI Dr. rer. pol. Rodon Pedrason, M.A. yang menyatakan bahwa: Port Visit sendiri merupakan bagian diplomasi pertahanan untuk meningkatkan Confidence building Measure (CBM). Dalam kegiatan seperti *Courtesy Call*, melaksanakan Seminar, diskusi bersama, kemudian dilakukan kegiatan berupa olahraga bersama, *fun games*, dan juga undangan jamuan makan malam yang dilanjutkan dengan penampilan budaya masing masing negara yang diperuntukkan untuk memperat hubungan antara tiga negara yang semuanya dilakukan secara bergiliran baik itu di Indonesia Filipina dan juga Indonesia.

Rangkaian kegiatan tersebut merupakan kegiatan-kegiatan diplomasi pertahanan yang dapat mendukung Confidence Building Measures (CBMs). Seperti dikatakan (Cottey & Foster, 2004, p. 7) bahwa kegiatan berupa Kunjungan kenegaraan, berdialog, berbagi informasi strategis, pembatasan kapasitas pertahanan, deklarasi kerja sama strategis, pertukaran perwira, melakukan pendidikan militer, kesepakatan hubungan baik, serta latihan militer bersama secara bilateral maupun multilateral untuk tujuan pelatihan merupakan kegiatan untuk membangun rasa saling percaya diantara negara.

Meskipun sebelumnya ketiga negara masih memiliki sejarah konflik perbatasan, dapat dipahami bahwa dalam kerja sama ini dapat meningkatkan hubungan rasa saling percaya yang merupakan bagian dari Instrumen Diplomasi Pertahanan. Hal ini ditandai dengan pernyataan Mayor Laut (P) Herstyadi Sapto Condro sebagai komandan KRI Sura 805 yang mengikuti kegiatan tahunan port visi bahwa antusiasme dari tiap tiap kontingen negara yang terlihat bersemangat di setiap kunjungan baik saat kunjungan ke Indonesia, Malaysia maupun di Filipina. Dalam kunjungannya di Indonesia disediakan berbagai fasilitas, penginapan, pesta kecil kecilan yang semua itu dilakukan untuk meningkatkan interaksi, dan komunikasi. Sehingga nantinya saat kunjungan ke negara lain rasa kekeluargaan sudah terbangun dengan baik.

CBMs dilakukan suatu negara untuk membina hubungan baik antara satu negara dengan negara lainnya guna menghindari perbedaan persepsi antar negara maupun menurunkan ketegangan dengan cara saling terbuka satu sama lain mengenai kebijakan negara, transparansi dalam pengembangan kemampuan militer sehingga tidak ada mispersepsi dan menimbulkan kepercayaan diantara keduanya. CBMs biasanya dilakukan dalam masa damai untuk membangun hubungan saling percaya melalui jalur bilateral maupun multilateral dengan tujuan untuk mengurangi maupun mencegah ketidakpastian dan mispersepsi antara negara-negara

di dunia. Agar CBMs dapat berjalan efektif, perlu adanya transparansi untuk membangun pola perilaku dan rasa saling menyakinkan guna meningkatkan rasa saling percaya (Glaser, 2015).

Rodon Pedrason (2015) dalam bukunya yang berjudul *ASEAN Defense Diplomacy; the Road to Southeast Asian Defense Community* mengungkapkan bahwa diplomasi pertahanan ditujukan untuk membangun kepercayaan yang pada gilirannya dapat mencegah konflik melalui penguatan persepsi kepentingan bersama dengan mantan atau calon musuh. Diplomasi pertahanan merupakan sarana untuk mengejar tujuan luar negeri dan keamanan yang lebih luas melalui dukungan negara lain di bidang pertahanan, bantuan kemanusiaan, masalah keamanan antar negara, dan kapasitas perdamaian.

Dengan demikian, rasa saling percaya dan pengertian dapat dibangun, dan area kerja sama yang lebih luas mungkin dapat dicapai. Diplomasi pertahanan dapat mendorong reformasi di bidang keamanan dan pertahanan, yang berarti kontrol sipil atas kebijakan pertahanan dan angkatan bersenjata. Dalam konteks bantuan kemanusiaan, masalah keamanan antar negara dan dukungan perdamaian, dan khususnya ASEAN, tujuan difokuskan pada kerja sama regional yang menempatkan hal-hal tersebut sebagai hal masalah keamanan yang biasa

Oleh karena itu, Strategi diplomasi pertahanan dalam penelitian tentang pelaksanaan Port Visit Indomalphi di Laut Sulu-Sulawesi ini dapat dikatakan sudah memenuhi dari dua karakter utama diplomasi pertahanan, yaitu; diplomasi pertahanan dalam membangun rasa saling percaya (*defense diplomacy for confidence building measures*) dan diplomasi pertahanan guna membangun kapasitas militer (*defense diplomacy for defense capacity*). Selain itu konsep diplomasi pertahanan yang sesuai dengan penelitian ini juga adalah konsep yang dikemukakan oleh Andrew

Cottey yaitu bahwa salah satu kegiatan dari diplomasi pertahanan adalah melakukan kontak serta latihan bersama unit militer dan kunjungan kapal.

Kemudian terjalannya kontak bilateral dan multilateral antara pejabat militer senior dan pegawai sipil di bidang pertahanan akan mempromosikan lingkungan internasional yang lebih kooperatif dan stabil (Cottey & Foster, 2004). Sehingga, dalam pelaksanaan Port Visit Indomalphi dapat dikatakan sebagai aktivitas diplomasi pertahanan karena merupakan suatu bentuk latihan antara pasukan militer masing masing negara yang dapat membantu dalam mempromosikan lingkungan internasional yang lebih kooperatif dan stabil. Dapat dipahami bahwa dalam menyelesaikan suatu masalah strategi diplomasi pertahanan Indonesia dilakukan melalui kesepakatan bersama dengan berpedoman pada usaha untuk memperbesar persamaan dan memperkecil perbedaan dalam rangka meredam konflik. Indonesia berkomitmen dalam menciptakan perdamaian dan berdampingan secara rukun, serta saling menghormati kedaulatan masing-masing negara.